



KNOWLEDGE BASED INDUSTRY
BASIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN MASA DEPAN
(PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAERAH PERBATASAN DAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN)

Sumbangan Pemikiran dan Saran untuk Perubahan Orientasi
Pembangunan Peternakan Nasional di Masa Depan

Oleh :

Drh. H. MASTUR AENY RACHMAN NOOR, M.Si



KNOWLEDGE BASED INDUSTRY
BASIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN MASA DEPAN
(PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAERAH PERBATASAN DAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN)

Sumbangan pemikiran dan saran untuk Perubahan Orientasi
Pembangunan Peternakan Nasional di Masa Depan

Oleh :

Drh. H. MASTUR AENY RACHMAN NOOR, M.Si



KATA PENGANTAR

Pembuatan Position Paper dengan judul **KNOWLEDGE BASED INDUSTRY BASIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN MASA DEPAN (Pembangunan Peternakan Daerah Perbatasan dan Percepatan Pembangunan Peternakan)** adalah merupakan upaya untuk memberikan gambaran yang ingin dicapai dalam pembangunan peternakan secara nasional. Dalam rancangan ini pembangunan peternakan yang diharapkan adalah peternakan yang berbasis sumberdaya lokal yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri peternakan atau "*knowledge based industry*". Dengan dasar tersebut diharapkan peternakan akan mampu menghasilkan produktivitas, efisiensi dan keamanan produk yang terjamin yang memenuhi kaidah kecukupan, halal, aman, utuh dan sehat.

Diberlakukannya perdagangan bebas menuntut produk peternakan yang memiliki daya saing tinggi yaitu berkualitas, efisien, kontinyu dan memenuhi selera pasar. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang sinergis antara seluruh unsur pelaku usaha yang berbasis agribisnis peternakan. Disisi lain implementasi pembangunan peternakan harus mampu merangsang berkembangnya kreatifitas pengusaha/petani ternak sehingga dapat memproduksi sesuai keinginan pasar dimana dalam hal ini peran Pemerintah hanya sebagai fasilitator, promotor dan regulator.

Dalam mempertajam keunggulan kompetitif yang didasarkan kepada "*knowledge based industry*" maka industri yang dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus meliputi *on-farm*, *off-farm* maupun industri penunjangnya seperti industri vaksin, obat hewan dan peralatan untuk industri peternakan. Disamping itu keunggulan komparatif juga dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan yang kurang produktif (HPH dan HGU perkebunan yang terlantar) baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa akan memberikan kontribusi yang cukup besar khususnya dalam



memberikan kesempatan investasi yang seluas-luasnya dibidang budidaya dan pengolahan hasil peternakan.

Pembangunan peternakan di daerah perbatasan dengan pola serupa akan menghasilkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti meningkatkan ketahanan nasional. Bagi daerah bencana yang memerlukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka mempercepat pemulihan masyarakat dapat dilakukan tahapan-tahapan rehabilitasi, pemulihan kinerja dan pemantapan wilayah pengembangan komoditi peternakan berbasis sumberdaya lokal.

Harapan penulis, paper ini dapat memberikan dukungan kepada visi peternakan yaitu **"Terwujudnya Masyarakat yang Sehat dan Produktif serta Kreatif melalui Pembangunan Peternakan yang Tangguh dan Berbasis Sumberdaya Lokal"**. Visi ini juga merupakan penjabaran dari visi pertanian yaitu **"Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Sehat melalui Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis yang Berdaya Saing, Berkerakyatan, Berkelanjutan dan Desentralisasi"**. Semoga paper ini dapat memberikan manfaat terhadap kesuksesan pembangunan peternakan di masa yang akan datang.

Subang, 17 Januari 2005

Penulis,



Drh. H. MASTUR AR. Noor, M.Si

NIP. 080 034 329



EKSEKUTIF SUMMARY

KNOWLEDGE BASED INDUSTRY

BASIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN MASA DEPAN

(PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAERAH PERBATASAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN)

Sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian, peningkatan produksi peternakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal baik pada lingkup global maupun regional. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, stabilitas politik dan ekonomi serta pemberlakuan *technical barrier on trade, sanitary and phytosanitary* dalam perdagangan dan jasa merupakan faktor-faktor yang sedikit banyak akan berpengaruh pada pembangunan sub sektor peternakan di masa mendatang.

Motto yang akan menjadi acuan utama dalam pembangunan peternakan 2005-2009 adalah **"Membangun Peternakan Modern berdasarkan *knowledge based industry* yang Maju, Mandiri dan Berkesinambungan.** Motto tersebut ditetapkan dalam rangka mendukung visi pembangunan peternakan yaitu **Terwujudnya Masyarakat yang Sehat dan Produktif serta Kreatif melalui Pembangunan Peternakan Tangguh Berbasis Sumberdaya Lokal.**

Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Harmonisasi infrastruktur "*knowledge based industry*" yaitu pihak masyarakat industri, akademis (Perguruan Tinggi), dan birokrat (Pemerintah)
2. Menyediakan pangan asal ternak yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas
3. Memberdayakan sumberdaya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi
4. Menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan peternak
5. Menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis peternakan
6. Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung peternakan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, ditetapkanlah strategi pembangunan peternakan sebagai berikut :

1. Pengembangan wilayah berdasarkan komoditas ternak unggulan
2. Pengembangan kelembagaan petani ternak
3. Peningkatan usaha dan industri peternakan
4. Optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan serta perlindungan sumberdaya lokal
5. Pengembangan kemitraan yang lebih luas dan saling menguntungkan
6. Mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan



Tujuan pembangunan peternakan 2005-2009 dirumuskan dalam **Panca Dharma Pembangunan Sub Sektor Peternakan**, yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak
2. Terpenuhinya konsumsi pangan asal ternak, bahan baku industri dan ekspor
3. Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
4. Meningkatnya peranan kelembagaan peternak
5. Tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam

Guna memperbaiki kinerja pembangunan peternakan di masa yang akan datang serta dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan maka disusunlah Program Utama Pembangunan Peternakan Nasional melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan dari sistem yang terpusat kepada desentralisasi
2. Pelaksanaan pembangunan dari dominasi pemerintah kepada memperluas peran masyarakat dan swasta
3. Pengawasan pembangunan dari dominasi pemerintah ke arah kontrol masyarakat yang meningkat, yang menuntut transparansi, keterbukaan, serta kejujuran
4. Pengelolaan pembangunan secara partisipatif
5. Privatisasi bertahap
6. Fungsi pelayanan pemerintah dilaksanakan secara terpadu oleh semua pihak terkait sehingga terjalin sinergi bagi berfungsinya sistem agribisnis secara utuh

Program pembangunan peternakan tahun 2005-2009 pada hakekatnya adalah merupakan kelanjutan dari program pembangunan periode sebelumnya yang esensinya adalah pengembangan agribisnis sebagai bagian dari pembangunan perekonomian wilayah. Dengan mengacu kepada kebijakan pembangunan pertanian, maka program utama dan penunjang pembangunan peternakan untuk tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Pengembangan Agribisnis
3. Program Peningkatan Konsumsi Protein Hewani
 - 3.1. Sub Program Mendesak Kecukupan Daging
 - 3.2. Sub Program Swasembada Telur
 - 3.3. Sub Program Peningkatan Konsumsi Susu
4. Program Pembangunan Peternakan Daerah Perbatasan
5. Program Percepatan Pembangunan Peternakan
6. Program Tanggap Darurat (sebagai upaya *recovery* di daerah konflik/bencana)



Beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan peternakan tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut :

1. Dari aspek teknis, terjadi peningkatan kelahiran dari 19.5% menjadi 22.9%, dan penurunan angka kematian dari 3% menjadi 2%.
2. Terjadi peningkatan pertumbuhan populasi ternak sapi dari 0.96% (2005) menjadi 1.35% (2009) yang akan berdampak pada peningkatan produksi daging sapi dalam negeri dari 83.0% menjadi 93.0%. Sebaliknya terjadi penurunan suplai daging sapi yang berasal dari impor sapi bakalan dari 10.0% menjadi 4.0% dan importasi daging sapi berkualitas juga menurun dari 5.0% menjadi 3.0%
3. Terjadi penurunan jumlah impor sapi bakalan selama kurun waktu 2005-2009 dari 170.000 ekor menjadi 74.000 ekor. Sementara itu terjadi peningkatan pasokan produksi daging sapi dalam negeri dari 307.000 ton menjadi 464.000 ton selama kurun waktu yang sama.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
EKSEKUTIF SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran	1
1.2. Lingkungan Strategis	3
BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN	5
2.1. Kebijakan	5
2.1.1. Motto	5
2.1.2. Visi	6
2.1.3. Misi	8
2.1.4. Strategi	8
2.1.5. Pendekatan	9
2.1.6. Tujuan	9
2.1.7. Sasaran	10
2.2. Kebijakan Khusus Fungsional	11
2.2.1. Produksi dan Faktor Produksi	11
2.2.2. Pengembangan Usaha	12
2.2.3. Sumberdaya Alam	12
2.2.4. Agro Industri	12
2.2.5. Alih Teknologi	12
2.2.6. Modal	12
2.2.7. Sumberdaya Manusia	13
2.2.8. Manajemen	13
2.2.9. Sentra Komoditas	13
BAB III TIANG-TIANG PENYANGGA PEMBANGUNAN PETERNAKAN	14
3.1. Tiang Utama	14
3.2. Tiang Pendukung	14
3.3. Tiang Pelengkap	15
BAB IV PROGRAM	16
4.1. Landasan Umum Program	16
4.2. Pendekatan Program	17
4.3. Pelaksanaan Program	18
4.4. Jenis Program	19



4.4.1. Program Utama	19	
4.4.1.1. Program Ketahanan Pangan	20	
4.4.1.2. Program Pengembangan Agribisnis	21	
4.4.1.3. Program Peningkatan Konsumsi Protein Hewani	23	
A. Sub Program Mendesak Kecukupan Daging	23	
B. Sub Program Mempertahankan Swasembada Telur	28	
C. Sub Program Peningkatan Konsumsi Susu	28	
4.4.2. Program Penunjang	29	
4.4.2.1. Program Pembangunan Peternakan Daerah Perbatasan	29	
4.4.2.2. Program Percepatan Pembangunan Peternakan	30	
4.4.2.3. Program Tanggap Darurat	32	
BAB V	INVESTASI YANG DIBUTUHKAN	35
BAB VI	RENCANA KERJA	36
6.1.	Dasar-dasar	36
6.2.	Wewenang Pemerintah Pusat Bidang Peternakan	36
6.3.	Tugas Pokok Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan	37
6.4.	Pokok-pokok Kegiatan Operasional	39
	A. Sekretariat	39
	B. Perbibitan	40
	C. Budidaya	41
	D. Kesehatan Hewan	42
	E. Pengembangan Peternakan	43
	F. Kesehatan Masyarakat Veteriner	44
	G. PUSPITNAK	45
BAB VII	KETERPADUAN DAN PENJABARAN PROGRAM PERTANIAN BERBASIS KOMODITAS PETERNAKAN	46
7.1.	Dasar Keterpaduan	46
7.2.	Isu-isu Kritis Pengembangan Sistem Agribisnis Berbasis Peternakan	47
7.2.1.	Ternak Potong	47
7.2.2.	Ternak Unggas	48
7.2.3.	Ternak Perah	48
7.3.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung	49
7.3.1.	Faktor Penghambat	49
7.3.2.	Faktor Pendukung	50
7.4.	Konsep dan Definisi	50
BAB VIII	PENUTUP	55



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Hewan atau ternak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; bahwa perlindungan terhadap hewan, tanaman, manusia serta lingkungan hidup harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah harmonisasi, transparansi dan ekivalensi secara selaras, seimbang, serasi tanpa rekayasa dan diskriminasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Sebagai sub sektor yang berperan dalam penyediaan pangan yang berasal dari ternak / hewan yang harus memenuhi kaidah ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), disadari bahwa masalah utama yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah kemampuan dalam menyediakan bahan pangan asal ternak untuk memenuhi konsumsi protein hewani masyarakat sesuai dengan standar norma gizi minimum 6 gram/kapita/hari (Widyakarya, 1998) atau setara dengan konsumsi daging 10,10 kg, telur 3,5 kg dan susu 6,4 kg/kapita/tahun.



Penyediaan pangan asal hewan ini merupakan langkah dan kegiatan strategis dalam menciptakan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas agar dapat bersaing dalam era globalisasi dan sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa konsumsi pangan asal hewan yang cukup, dalam jangka panjang ke depan Indonesia sebagai negara besar akan sangat tergantung dalam segala aspek kehidupan dari negara-negara lain.

Dalam situasi dan kondisi sekarang, maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya pembenahan melalui transformasi struktur dan budaya dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, perlu adanya pemahaman terhadap konteks kerawanan / keamanan aset yang ada (*vulnerability context*). Hal ini biasanya berkaitan antara perubahan dengan kecenderungan pada isu yang berkembang di masyarakat dan perubahan pada budaya lokal yang statis.

Kedua, perluasan peran swasta dalam pembangunan. Hal ini dikaitkan dengan proses *reinventing government* dan privatisasi.

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan aset vital yang dimiliki oleh petani peternak melalui pendekatan kelompok bersama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembangunan sub sektor peternakan menerapkan paradigma baru yang didorong oleh adanya proses reformasi pembangunan yang memfokuskan pembangunan peternakan kepada ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan ekspor.



1.2. Lingkungan Strategis

Sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian, perkembangan sub sektor peternakan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal, yaitu :

1.2.1. Lingkungan Strategis Global dan Regional (internal)

Pada aspek ini pembangunan sub sektor peternakan juga tidak terlepas dari aturan-aturan perdagangan bebas, dimana peternakan akan terkait dengan diberlakukannya *technical barrier on trade, sanitary and phytosanitary* dan liberalisasi dalam perdagangan dan jasa. Pembangunan sub sektor peternakan dalam lingkungan strategis ini akan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal :

1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu 1,5% per tahun yang memerlukan bahan pangan berkualitas
2. Proses transformasi struktural perekonomian yang menurunkan pangsa sektor pertanian, padahal di sisi lain mayoritas tenaga kerja masih bertumpu di sektor tersebut
3. Terjadinya konversi lahan dari pertanian ke industri atau pemukiman yang menyebabkan semakin terbatasnya jumlah kepemilikan lahan garapan per orang petani yang berakibat pada meningkatnya jumlah petani gurem. Akibat lain dari semakin luasnya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan produktivitas lahan menurun secara nyata.



1.2.2. Lingkungan Strategis Politik dan Ekonomi (eksternal)

Pada lingkungan strategis ini sub sektor peternakan akan dihadapkan pada pergeseran sebagian fungsi dan peran pemerintah kepada swasta dan masyarakat menyusul diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.



BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN

2.1. Kebijakan

Pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah pembangunan pertanian secara luas dalam satu kawasan usaha tani. Sebagai langkah awal dalam membangun sub sektor peternakan diperlukan model pengembangan yang dapat mewakili paradigma baru dalam pembangunan peternakan yang memihak kepada rakyat dimana adanya pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan peternakan. Model tersebut dapat dituangkan dalam sebuah slogan atau motto yang akan memberi arah pada gerak organisasi dalam melakukan kegiatan.

2.1.1. Motto

Motto yang akan menjadi acuan utama dalam pembangunan peternakan adalah **Membangun Peternakan Modern berdasarkan "*Knowledge based Industry*" yang Maju, Mandiri, dan Berkesinambungan.**

Peternakan modern dapat diartikan sebagai industri peternakan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara intensif guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi. "***Knowledge based Industry***" berarti industri peternakan yang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengembangan usahanya guna meningkatkan daya saing industri peternakan di Indonesia agar dapat berkompetisi di tingkat regional, nasional maupun internasional.



Peternakan yang maju, mandiri dan berkesinambungan yaitu peternakan tangguh yang dapat memberdayakan sumber daya manusia peternaknya secara optimal sehingga mampu membangun dan mengelola usaha peternakan yang berwawasan agribisnis.

2.1.2. Visi

Paradigma baru pembangunan peternakan dengan visi baru yaitu **Terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif serta kreatif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal.** Visi pembangunan peternakan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi pembangunan sektor pertanian, yaitu **Terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralisasi.**

Visi pembangunan peternakan terkait dengan sistem pembangunan produksi peternakan merupakan bagian dari suatu totalitas kinerja agribisnis, yaitu sub sistem usaha tani berupa produksi primer ternak dan sub sistem ini akan menjadi suatu kesatuan kinerja yang tidak terlepas dari suatu sistem agribisnis hulu berupa kegiatan ekonomi input produksi peternakan, informasi dan teknologi. Selain itu produksi peternakan merupakan rangkaian yang juga tidak akan lepas dari sub sistem agribisnis hilir, yaitu perdagangan, pengolahan, dan jasa agribisnis. Dan akhirnya produksi peternakan merupakan bagian dari sub sistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis.



Peternakan tangguh juga dapat didefinisikan sebagai perusahaan agribisnis, yaitu usaha komoditi di bidang usaha tani, baik skala besar atau kecil, swasta atau pemerintah, perorangan atau koperasi. Sehingga peternakan tangguh dapat diterjemahkan sebagai peningkatan kuantitas, kualitas manajemen dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri dan memanfaatkan peluang pasar.

Peternakan tangguh dapat dicirikan oleh adanya kemampuan daya saing. Oleh karena itu peternakan tangguh memiliki efisiensi tinggi baik dalam mutu, harga, dan biaya produksi serta kemampuan untuk memasuki pasar, meningkatkan pangsa pasar dan memberikan pelayanan profesional.

Visi pembangunan peternakan yang berbasis sumberdaya lokal mengandung makna bahwa visi tersebut adalah visi kerakyatan. Cirinya adalah berkembangnya usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara luas, baik dalam peluang berusaha, kesempatan kerja maupun meningkatkan pendapatan. Hal ini tidak berarti hanya memperhatikan usaha-usaha kecil dan menengah, tetapi juga usaha skala besar. Dalam konsep kerjasama dengan usaha kecil dan menengah harus mempunyai *multiplier effect* yang besar.

Berbasis sumberdaya lokal juga mengandung makna berkelanjutan, sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya agribisnis yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang semakin menyejahterakan masyarakat, secara ekonomis, sosial dan peduli terhadap lingkungan hidup. Karena dalam sistem dan perusahaan agribisnis terdapat keterkaitan yang sangat kuat antar kepentingan para pelakunya, termasuk antara lain konsumen, maka distribusi insentif dan manfaat ekonomi diantara pelaku agribisnis merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dari usaha agribisnis.



2.1.7. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan peternakan tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut :

- (1) **Pendapatan.** Diharapkan pada akhir tahun 2009 rata-rata pendapatan peternak dapat melampaui Upah Minimum Regional (UMR).
- (2) **Produksi dan Konsumsi**
Produksi daging, telur dan susu. Diharapkan pada akhir tahun 2009 diperkirakan produksi daging akan mencapai 1,55 - 1,86 juta ton, produksi telur 0,58-0,76 juta ton dan produksi susu 0,36 - 0,41 juta ton.
Konsumsi. Diharapkan pada akhir tahun 2009 konsumsi protein hewani masyarakat minimum mencapai 6 gram/kapita/hari atau setara dengan konsumsi daging 10.10 kg, telur 3.5 kg dan susu 6.4 kg/kapita/tahun.
- (2) **Kesempatan kerja.** Diperkirakan ada 500 ribu tambahan tenaga kerja dalam kurun waktu tahun 2005 - 2009 mengikuti peningkatan jumlah populasi ternak.
- (4) **Kelembagaan peternak.** Terwujudnya kelembagaan petani peternak yang semakin mandiri dan mampu mengakses (menjangkau) sendiri faktor produksi dan pelayanannya. Indikatornya dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kelompok mandiri.
- (5) **Keseimbangan kesempatan sumberdaya alam.**
Tercapainya keseimbangan populasi dan daya dukung lingkungan. Indikatornya adalah adanya keseimbangan proporsi antara populasi ternak dan daya dukung lahan serta sumberdaya alam. Di lain pihak produksi mampu memenuhi kebutuhan konsumsi sebagian besar masyarakat (90%).



2.2. Kebijakan Khusus Fungsional.

2.2.1. Produksi dan Faktor Produksi

Kebijaksanaan operasional produksi dan faktor produksi peternakan meliputi antara lain :

- (1) Sumberdaya ternak, yang meliputi peningkatan populasi ternak. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kelahiran, produksi dan produktivitas, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, pengendalian reproduksi dan penyediaan bibit ternak bermutu.
- (2) Substitusi jenis ternak potong, yaitu dengan usaha pengembangan jenis ternak potong lain dalam rangka penganeekaragaman sumber ternak potong.
- (3) Sumberdaya pakan meliputi pembinaan mutu pakan, pengembangan pakan alternatif, pemanfaatan sumberdaya pakan hijauan lokal dan pemanfaatan teknologi pakan.
- (4) Sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi peternakan serta pendayagunaan alat/mesin dan sarana peternakan.
- (5) Sumberdaya kelembagaan meliputi pembinaan kelembagaan penyuluhan, pembinaan kelembagaan swasta dan desentralisasi pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB).



2.2.2. Pengembangan Usaha

Kebijaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan usaha peternakan dilakukan melalui iklim usaha yang kondusif, kemitraan dan mekanisme pasar.

2.2.3. Sumberdaya Alam

Pendayagunaan sumberdaya alam untuk pengembangan peternakan harus didasari oleh penataan ruang dan prioritas pengembangan wilayah, daerah dan kawasan peternakan.

2.2.4. Agro Industri

Agro industri yang merupakan salah satu sub sistem agribisnis meliputi pengolahan produk primer dan pengolahan sekunder serta penyediaan sarana dan prasarana peternakan.

2.2.5. Alih Teknologi

Teknologi yang dikembangkan diharapkan berbasis sumberdaya lokal, spesifik lokasi dan berhasil guna. Alih teknologi akan didorong melalui kelompok tani, organisasi profesi, asosiasi, pakar dan perguruan tinggi.

2.2.6. Modal

Penyediaan modal usaha peternakan diupayakan melalui pemanfaatan jasa Bank Syariah, Kredit Program, Modal Ventura serta investasi PMA/PMDN, pola kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar disamping *block grant* dan kebijakan moneter serta fiskal spesifik lokasi.



2.2.7. Sumberdaya Manusia

Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia peternakan dilaksanakan dengan mengidentifikasi jumlah dan kualitas SDM yang ada untuk mencapai keseimbangan *supply* dan *demand* serta optimalisasi pemanfaatan SDM. Pengembangan SDM diarahkan kepada peningkatan kesadaran dan rasa percaya diri melalui peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan status sosial.

2.2.8. Manajemen

Kebijakan yang ditempuh adalah menerapkan *total quality management* (TQM) dengan 2 prinsip utama, yaitu pemusatan perhatian kepada klien dan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

2.2.9. Sentra Komoditas

Perubahan orientasi dari *commodity based* ke arah *resource based* dan selanjutnya mengarah ke *Knowledge based Industry* berarti bahwa sentra produksi yang didukung oleh kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya alam, kualitas sumberdaya lahan sebagai sumber pakan ternak dan akses pasar memperoleh nilai tambah dengan adanya dukungan sumberdaya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar kuat yang akan membawa pengembangan industri peternakan ke arah peternakan modern.



BAB III

TIANG-TIANG PENYANGGA PEMBANGUNAN PETERNAKAN

Dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat diperlukan membangun tiang-tiang penyangga, sehingga produk pangan memiliki segmentasi pasar yang stabil. Adapun tiang-tiang tersebut adalah :

3.1. Tiang Utama

Tiang utama adalah pembangunan komoditi ternak yang berbasis sumberdaya alam lokal. Yang termasuk kedalam komoditi ternak utama adalah sapi potong, kambing, domba, ayam buras dan itik. Jenis ternak ini merupakan komoditi ternak asli Indonesia (ternak lokal) yang sangat potensial sebagai sumber tumpuan kehidupan masyarakat pedesaan dan dianggap sebagai komoditi utama dalam memberdayakan peternak di pedesaan untuk dapat mensejahterakan dirinya yang pada gilirannya akan mensejahterakan seluruh masyarakat.

3.2. Tiang Pendukung

Yang termasuk dalam tiang pendukung adalah pembangunan komoditi ternak yang memerlukan investasi dan teknologi tinggi. Komoditi ayam ras baik petelur dan pedaging, babi dan ternak sapi perah berada pada komoditi pendukung, karena tingkat ketergantungan yang masih relatif tinggi terhadap agroinput dan teknologi dari luar. Di beberapa wilayah komoditi ini cukup berperan penting dalam membangun perekonomian pedesaan serta mampu menunjukkan peran yang kuat dalam mensuplai kebutuhan hasil ternak.



3.3. Tiang Pelengkap

Membangun komoditi ternak yang memiliki potensi baru. Komoditi aneka ternak seperti kelinci, merpati, rusa, burung unta dan jenis aneka ternak lainnya merupakan komoditi pelengkap, karena ternak ini dapat dikembangkan sebagai komoditi penunjang konsumsi pangan hewani rakyat dan sumber alternatif pendapatan.



BAB IV PROGRAM

4.1. Landasan Umum Program

Perubahan menuntut berkembangnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Peran pemerintah lebih pada fungsi-fungsi pengaturan, fasilitas dan pelayanan, perlindungan masyarakat dari gangguan keamanan dan persaingan yang tidak sehat, serta fungsi publik yang tidak mungkin dilaksanakan oleh swasta. Sebaliknya masyarakat dituntut untuk dapat memberdayakan dirinya sehingga mampu mengembangkan usahanya, termasuk mengembangkan pelayanan dan jasa di sub sektor peternakan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran guna memperbaiki kinerja pembangunan peternakan disusun program Utama Pembangunan Peternakan Nasional. Program ini mengacu pada program utama pembangunan pertanian sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan peternakan bagi seluruh pelaku pembangunan nasional, yaitu pemerintah (Pusat dan Daerah), masyarakat tani (petani, peternak, nelayan), serta swasta (pengusaha dan koperasi).

Pemerintah (Pusat dan Daerah) memanfaatkan struktur program utama pembangunan peternakan ini untuk memainkan peranannya sebagai regulator maupun fasilitator guna menciptakan kondisi kondusif bagi petani untuk menjalankan usahanya secara efisien dan berdaya saing. Fungsi-fungsi pemerintah antara lain dalam hal : Pembuatan sistem kelembagaan/aturan main, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, pencitaan dan pemeliharaan barang-barang publik, serta pemeliharaan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.



- 5) Privatisasi bertahap berbagai fungsi pemerintah baik pelayanan maupun pelaksanaan, kepada swasta atau masyarakat khususnya jasa pelayanan yang secara ekonomis dapat menghasilkan pemasukan.
- 6) Fungsi pelayanan pemerintah dilaksanakan secara terpadu oleh semua pihak terkait, baik lintas subsektor maupun lintas sektor. Setiap institusi yang berperan memfungsikan berbagai subsistem agribisnis, sehingga memberikan kontribusinya dan membangun sinergi bagi berfungsinya sistem agribisnis secara utuh.

4.3. Pelaksanaan Program

Pada prinsipnya pembangunan peternakan dilaksanakan oleh masyarakat. Dukungan pemerintah lebih kepada pengembangan agribisnis peternakan yang diarahkan untuk mengatasi kegagalan atau ketidaksempurnaan pasar dan penyediaan prasarana publik yang tidak diminati dan tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat dan swasta.

Dalam rangka mengoperasionalkan pendekatan baru tersebut akan ditempuh beberapa langkah proaktif seperti :

- (1) penyebarluasan informasi kebijakan dan program,
- (2) penumbuhan lembaga dan mekanisme pemecahan masalah keluhan aspirasi masyarakat,
- (3) penyelenggaraan sistem pelaporan yang transparan,



- (4) keterlibatan unsur-unsur masyarakat madani dalam perencanaan dan pembangunan program. Oleh karena itu peningkatan kapasitas institusi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan akan terus dilakukan agar dapat memperbaiki sistem manajemen pembangunan pertanian sesuai dengan pendekatan baru tersebut.

4.4. Jenis Program

4.4.1. Program Utama

Program pembangunan peternakan tahun 2005-2009 ini pada hakekatnya adalah merupakan kelanjutan dari program pembangunan periode sebelumnya yang esensinya adalah pengembangan agribisnis sebagai bagian dari pembangunan perkonomian wilayah. Pengalaman dan kajian terhadap program pada periode yang lalu memberikan indikasi perlunya struktur program yang lebih fleksibel untuk periode ke depan, khususnya dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam antar daerah.

Untuk itu dirumuskan dua program utama pembangunan peternakan yang masing-masing dapat mengakomodasi spektrum kegiatan yang lebih luas meliputi seluruh subsistem agribisnis, sehingga dapat menjawab kebutuhan yang sangat beragam antar wilayah. Dengan mengacu pada fokus kebijakan pembangunan pertanian seperti diuraikan di atas, maka program utama Pembangunan Peternakan tahun 2005-2009 adalah :



4.4.1.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a. Pengertian

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Program PKP) dimaksudkan untuk mengoperasionalkan kebijakan peningkatan ketahanan pangan. Dalam pengertian kebijakan operasional pembangunan, ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan) dan stabilitas pengadaannya. Disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan, ketahanan pangan juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan.

b. Tujuan

Tujuan program PKP adalah meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dalam jumlah yang cukup, kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu, melalui peningkatan produksi, produktivitas dan pengembangan produk olahan.

c. Sasaran

Sasaran Program PKP ini adalah : (1) meningkatnya produksi bahan pangan secara berkelanjutan untuk memantapkan ketahanan pangan nasional, (2) meningkatnya produksi pangan sumber karbohidrat alternatif non beras yang berakar pada sumberdaya dan budaya lokal, (3) meningkatnya produksi pangan sumber protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, dan (4) meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan dan menurunnya konsumsi beras per kapita.



d. Jenis Komoditi

Komoditas ternak yang termasuk dalam Program PKP ini diutamakan pada komoditas yang diusahakan oleh sebagian besar para pelaku usaha skala kecil, yaitu ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba), ternak non ruminansia (babi dan kuda), unggas (ayam buras, ayam ras, dan itik) dan aneka ternak (kelinci, burung, puyuh, rusa, dll).

4.4.1.2. Program Pengembangan Agribisnis

a. Pengertian

Program Pengembangan Agribisnis (Program PPA) dimaksudkan untuk mengoperasionalkan kebijakan pembangunan peternakan berwawasan agribisnis yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk peternakan yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

b. Tujuan

Tujuan Program PPA adalah mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk peternakan dan industri peternakan maupun industri peternakan primer yang berdaya saing, menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan, tenaga kerja peternakan, pengembangan ekonomi wilayah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani dan produsen, dan mendukung pertumbuhan pendapatan nasional.



c. Sasaran

Sasaran Program PPA ini adalah :

1. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditas peternakan yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun ekspor
2. Meningkatnya volume dan industri pengolahan maupun ekspor serta berkurangnya pengeluaran volume dan impor hasil peternakan,
3. Meningkatnya kesempatan kerja produktif di pedesaan pada *on farm* dan *off-farm* yang memberikan imbalan (*return to factor*) yang layak,
4. Berkembangnya berbagai kegiatan usaha berbasis peternakan dengan wawasan agribisnis yang mampu memberikan keuntungan yang wajar,
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis dan memajukan perekonomian di pedesaan
6. Meningkatnya kemitraan yang lebih berkualitas yang membentuk jaringan (*network*) usaha yang lebih luas,
7. Terpeliharanya produktivitas sumberdaya alam, berkembangnya usaha pertanian konservasi, dan terjaganya kualitas hidup

d. Jenis Komoditi

Komoditas yang ditangani melalui Program PPA meliputi seluruh komoditas komersial peternakan diluar komoditas dalam Program PKP, yang sebagian besar diusahakan oleh pelaku usaha skala menengah dan besar, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.



4.4.1.3. Program Peningkatan Konsumsi Protein Hewani

A. Sub Program Mendesak Kecukupan Daging

a. Pengertian

Pengertian **kecukupan** adalah tercukupinya pangan hewani (khususnya daging sapi) hingga pada tingkat rumah tangga dengan harga terjangkau, aman, sehat, utuh dan halal. Pengertian **ketersediaan** adalah paling tidak 90-95 % tersedia dari suplai dalam negeri. Sehingga kecukupan dapat bersifat "**swasembada on trend**" artinya suatu saat dapat dilakukan ekspor bila memungkinkan.

b. Prinsip

Dalam melaksanakan program mendesak menuju kecukupan daging tersebut diperlukan suatu pendekatan yang mengintegrasikan aspek teknis, ekonomi dan sosial secara terpadu dalam satu paket program. Prinsip yang akan dianut adalah :

- a. Azas kelestarian sumber daya ternak nasional (populasi)
- b. Azas keseimbangan *supply-demand* (S-D)
- c. Azas kemandirian (mengurangi-impor)

c. Sasaran

1. Dari aspek teknis, diharapkan selama kurun waktu 2005-2009 terjadi peningkatan kelahiran dari 19,5% menjadi 22,9%, sedangkan angka kematian terjadi penurunan dari 3,0% menjadi 2,0%.



2. Terjadi peningkatan pertumbuhan populasi ternak sapi dari 0,96% (2005) menjadi 1,35% (2009). Sehingga untuk kurun waktu 2005-2009 akan terjadi peningkatan proporsi suplai daging sapi dalam negeri dari 83,0% menjadi 93,0%. Disisi lain akan mengurangi jumlah impor sapi bakalan dari 10, 0% menjadi 4,0% dan importasi daging sapi berkualitas dari 5,0% menjadi 3,0%
3. Terjadi penurunan jumlah impor sapi bakalan selama kurun waktu 2005-2009 dari 170 ribu ekor menjadi 74 ribu ekor. Sementara itu terjadi peningkatan pasokan produksi daging sapi dalam negeri dari 307 ribu ton menjadi 464 ribu ton pada kurun waktu yang sama.

d. Langkah-langkah operasional

Untuk mencapai kecukupan (swasembada) daging tersebut, maka upaya-upaya dalam bentuk kegiatan operasional yang perlu dilakukan antara lain :

1. Peningkatan produktivitas

- (a) Peningkatan kegiatan IB dan embrio transfer secara terpadu, terkonsentrasi dengan program penggemukan. Untuk ini perlu diupayakan pengadaan *elite bull* dan donor serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Pengadaan *elite bull* dan donor tersebut diharapkan akan meningkatkan produksi semen beku menjadi 6-7 juta dosis sesuai kebutuhan untuk menginseminasi betina produktif sebanyak 3 juta ekor.



Selain itu akan dihasilkan produksi embrio sebanyak 3.500 mudigah. Dengan dihasilkannya embrio tersebut, akan diperoleh keuntungan ganda yaitu secara cepat (satu generasi) terbentuk bibit unggul dan sekaligus tidak perlu lagi dilakukan importasi *bull* maupun donor. Diharapkan 3 juta akseptor (betina produktif) dapat di IB dan menghasilkan 1,8 juta anak sapi pada tahun 2009.

- (b) Pengembangan pakan yang cukup bermutu dan tersedia setiap saat. Pengembangan penyediaan pakan dengan menggunakan bahan baku dari sumber daya lokal.
- (c) Persilangan ternak kearah *dual purpose*. Upaya ini dimaksudkan untuk menghasilkan ternak dwiguna sehingga menjadi ternak yang dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai pedaging tapi juga ternak perah atau penghasil susu.
- (d) Pengembangan sentra baru kawasan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

2. Peningkatan populasi ternak

- (a) Pengendalian permotongan betina produktif. Data di lapangan menunjukkan bahwa dari seluruh ternak yang dipotong di RPH 40% nya adalah ternak betina. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa hampir 70%nya masih merupakan ternak produktif. Diperlukan program khusus untuk penyelamatan betina produktif melalui pendekatan



teknis dan ekonomis, antara lain melalui pembelian ternak betina produktif melalui program pemerintah/swasta dan digaduhkan kembali.

- (b) Pengendalian penyakit reproduksi. Penyakit reproduksi yang penting untuk dikendalikan adalah Brucellosis (penyakit keguguran/keluron menular). Penyakit ini banyak berkembang di propinsi-propinsi yang potensial sebagai sumber bibit ternak yaitu seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Kalimantan dan Jawa. Oleh karena itu melalui APBN dan APBD perlu dilakukan upaya pembebasan pulau per pulau. Selain itu juga perlu dijajaki bantuan teknis dari pihak luar termasuk luar negeri untuk membantu pengendalian penyakit ini, khususnya di wilayah Indonesia kawasan timur.
- (c) Penyediaan bibit ternak bermutu. Upaya ini bilamana perlu dilakukan adalah untuk menambah jumlah populasi ternak sekaligus meningkatkan mutu genetis ternak lokal.

3. Substitusi dan Diversifikasi

Upaya ini dilakukan agar terjadi substitusi daging ternak besar dengan ternak lainnya seperti unggas (pergeseran dari *red meat* ke *white meat*). Hal ini penting untuk dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan akan pasokan daging sapi semata. Operasionalisasi upaya ini dapat dilakukan melalui



upsus ayam buras, upsus itik, upsus kambing dan upsus domba yang kemudian dilanjutkan dengan peningkatan produktivitas ternak-ternak ayam buras dalam program pengembangan budidaya dan perbibitan ayam buras.

4. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan

- (a) Secara konsisten meningkatkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan ternak kearah komersialisasi dan privatisasi, sehingga UPT pembibitan ternak dapat menghasilkan bibit ternak yang berkualitas.
- (b) Mengembangkan kelembagaan penangkar bibit ternak rakyat (dilaksanakan oleh rakyat sendiri) semacam ***Village Breeding Center***,
- (c) Desentralisasi Balai Inseminasi Buatan (BIB) untuk mendekatkan penyediaan semen beku pada peternak dengan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini diprioritaskan pada daerah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTB, dan Sumatera Barat.
- (d) Adanya unit organisasi pada tingkat pusat (Eselon II) yaitu Pusat Pengembangan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio Ternak (PUSPITNAK), Dimana pusat ini akan membawahi dan membina pelayanan inseminasi buatan maupun transfer embrio di Indonesia yang didasarkan pada bagian yang tidak terpisahkan dengan pengembangan pembibitan ternak yang menjadi fokus program Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan.



- (e) Promosi dan Pengembangan ekspor produk pendukung dan pengamanan ternak, yang dilakukan UPT pemerintah maupun swasta (obat, vaksin). Pada saat ini telah dilakukan ekspor obat-obatan dan vaksin. Saat ini sedang dalam proses terdapat 10 jenis obat-obatan dan vaksin, untuk memenuhi permintaan luar negeri lainnya. Promosi dan pengembangan ekspor ini sekaligus untuk mendukung berkembangnya industri pendukung dalam mempercepat upaya kecukupan (swasembada) daging tahun 2005.

B. Sub Program Swasembada Telur

Langkah operasional yang dapat dilakukan untuk mempertahankan swasembada telur adalah melalui restrukturisasi industri berbasis sumberdaya lokal dengan pendirian pabrik pakan (mini), meningkatkan likuiditas peternak kecil dan pembebasan penyakit New Castle (ND), Avian Influenza (AI) dan Gumboro.

C. Sub Program Peningkatan Konsumsi Susu

Dalam upaya untuk meningkatkan suplai dalam negeri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan peternak terhadap Industri Pengolahan Susu (IPS), kegiatan operasional yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan program sapi pengganti (*replacement programme*), peningkatan kemampuan manajemen budidaya, dan pengendalian penyakit Brucellosis dan Mastitis.



4.4.2. Program Penunjang

Program ini merupakan penunjang pembangunan peternakan melalui sektor lain yang ada kaitannya dengan sub sektor peternakan mencakup antara lain :

- (1) Transmigrasi dan daerah miskin
- (2) Lingkungan Hidup
- (3) Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
- (4) Statistik
- (5) Pengembangan sumber-sumber dana alternatif

Operasionalisasi dari program penunjang ini melibatkan berbagai instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah. Program ini merupakan program yang sifatnya insidental (akan sangat diperlukan untuk dilakukan pada kondisi tertentu).

4.4.2.1. Program Pembangunan Peternakan Daerah Perbatasan

Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan dan pengamanan terhadap ancaman kemungkinan masuknya penyakit hewan menular dari negara yang berbatasan atau negara lain maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan alokasi dana ke daerah perbatasan yang rawan untuk pembangunan peternakan yang berbasis pada sumberdaya lokal
- b) Memberikan fasilitasi untuk menarik investasi di bidang peternakan di daerah perbatasan yang memungkinkan
- c) Memberikan fasilitasi kajian-kajian untuk pengembangan industri peternakan di daerah perbatasan



- d) Meningkatkan upaya dan fasilitasi penolakan dan pencegahan penyakit hewan dari luar negeri dengan memperkuat sumber daya manusia (petugas) fasilitas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dengan mempercepat pembangunan daerah perbatasan dengan keterpaduan sub sektor lain yang terkait akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan serta mengamankan wilayah Republik Indonesia dari masuknya penyakit hewan menular eksotik ke wilayah Indonesia.

4.4.2.2. Program Percepatan Pembangunan Peternakan

Dalam upaya mempercepat swasembada daging dan pengurangan impor sapi maka diperlukan beberapa kegiatan terobosan yang akan mempercepat pembangunan peternakan, antara lain :

- a) Memanfaatkan peran strategis peternakan Indonesia secara regional dan global. Indonesia sebagai negara kepulauan memungkinkan untuk membangun industri peternakan yang bebas dari berbagai penyakit sehingga memiliki peluang pasar bagi negara maju yang akan memberikan kontribusi terhadap devisa negara.
- b) Membuka kesempatan investasi di bidang peternakan dengan memanfaatkan HPH terlantar, lahan kritis, lahan tidur (kurang menguntungkan) yang cocok untuk peternakan dengan membuka investasi untuk HGU perbibitan serta pembesaran/penggemukan ternak sapi potong, kambing dan domba di luar Pulau Jawa.



BAB V

INVESTASI YANG DIPERLUKAN

Investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan produksi peternakan sesuai dengan sasaran yang diinginkan diperkirakan sebesar Rp 5,5 trilyun selama 5 tahun atau Rp 1,1 trilyun per tahunnya. Investasi ini diharapkan akan dipenuhi oleh sektor swasta 80-90%, sedangkan dari pemerintah hanya 10-20% yang diperoleh dari swadaya masyarakat, investasi PMA/PMDN, Bantuan Luar Negeri, Koperasi, Skim kredit dengan bunga rendah , APBN, APBD, serta kredit perbankan lainnya.

Khusus untuk daerah bencana gempa bumi dan tsunami serta daerah bencana lainnya besarnya investasi yang diperlukan tergantung kepada hasil kajian pada setiap wilayah yang terkena bencana terutama untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan kinerja serta pemantapan produksi dan produktifitas peternakan.



BAB VI

RENCANA KERJA

6.1. Dasar-dasar

Menindaklanjuti ketetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam Kebijakan Umum Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis Berbasis Peternakan Tahun 2005-2009 yang merupakan acuan umum ke depan pelaksanaan pembangunan peternakan, sambil menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Secara lebih rinci, sesuai dengan terjadinya pergeseran kewenangan pelaksana pembangunan diperlukan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan 2005-2009.

6.2. Wewenang Pemerintah Pusat Bidang Peternakan

Sambil menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 maka untuk sementara waktu pengaturan mengenai kewenangan pemerintah masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai berikut.

- (1) Pengaturan pemasukan dan pengawasan bibit dan pedoman standar bibit
- (2) Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak.
- (3) Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas peternakan.



- (2) **Sub Bidang Perbibitan**, melaksanakan penyusunan pedoman standar, norma kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengujian varietas dan pemuliaan ternak, ternak ruminansia, ternak non ruminansia dan unggas serta mutu bibit.
- (3) **Sub Bidang Budidaya Peternakan**, melaksanakan penyusunan pedoman standar, norma, kriteria, prosedur. dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengujian budidaya ternak potong, ternak perah, ternak unggas, aneka ternak dan hewan kesayangan serta pskan.
- (4) **Sub Bidang Pengembangan Peternakan**, melaksanakan penyusunan pedoman standar, norma, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang identifikasi potensi, bimbingan usaha, kelembagaan peternak serta evaluasi pengembangan.
- (5) **Sub Bidang Kesehatan Hewan**, melaksanakan penyusunan pedoman standar, norma, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, penolakan penyakit hewan, medis veteriner dan pengawasan obat hewan.
- (6) **Sub Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner**, melaksanakan penyusunan pedoman standar, norma, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang produk pangan hewani, produk hewan non pangan, higiene, sanitasi dan kesejahteraan hewan serta residu.
- (7) **Sub Bidang Pelayanan IB dan Transfer Embrio Ternak**, melaksanakan pengembangan pelayanan kegiatan inseminasi buatan dan aplikasi transfer embrio di Indonesia, sehingga lebih efektif dan produktif dalam rangka mencapai tujuan maupun sasaran pembangunan produksi peternakan yang mengacu kepada program peningkatan ketahanan pangan (PKP) dan program pengembangan agribisnis (PPA).



6.4. Pokok-pokok Kegiatan Operasional

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan seperti tersebut di atas, maka kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing sub bidang pada tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

(1) Jangka Pendek dan Menengah

- a. Mengembangkan perencanaan partisipatif
- b. Meningkatkan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, program dan proyek
- c. Menemukan permasalahan strategis
- d. Penataan pegawai
- e. Penyelesaian impassing jabatan fungsional
- f. Sosialisasi jabatan fungsional
- g. Sosialisasi peraturan fungsional
- h. Upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak
- i. Menyiapkan bahan usulan pimro/pimbagpro dan proyek
- j. Menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan anggaran pembangunan dan rutin oleh pengawas fungsional
- k. Menginformasikan hasil-hasil pembangunan peternakan
- l. Menunjang program privatisasi UPT



- m. Memfasilitasi peraturan perundangan bidang peternakan dan proses penyerahan kelembagaan dan asetnya sesuai otonomi daerah.

(2) Jangka Panjang

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan
- b. Meningkatkan penyusunan programkerjasama luar negeri
- c. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Mengembangkan pengelolaan keuangan dengan SAP
- e. Penuntasan amandemen UU No 6 tahun 1967 dan peraturan perundangan lainnya.

B. Pembibitan

(1) Jangka Pendek dan Menengah

- a. Fasilitas produksi *frozen semen* dan embrio dengan impor *bull* dan donor.
- b. Desentralisasi BIB.
- c. Menerapkan kebijakan persilangan sapi lokal dengan *breed* lain.
- d. *Recovery* perunggasan.
- e. Deregulasi peraturan dan standarisasi bibit.
- f. Memberikan kemudahan impor bibit.



- g. Pengembangan sistem pembibitan nasional.
- h. Pengembangan pembibitan pedesaan.
- i. Pelepasan bibit.

(2) Jangka Panjang

- a. Penyebaran pejantan untuk kawin alam.
- b. Pengembangan sumberdaya dengan fasilitas perbaikan mutu genetik jenis lokal dan pelestarian plasma nutfah.
- c. Mendorong pembibitan ternak swasta dan rakyat.
- d. Privatisasi UPT pembibitan.
- e. Penciptaan bibit ternak Indonesia
- f. Sertifikasi bibit.

C. Budidaya

(1) Jangka Pendek dan Menengah

- a. Memfasilitasi peningkatan populasi dan produktivitas ternak dengan :
 - Menyusun pedoman standar, norma, kriteria dan prosedur
 - Menyusun pedoman bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengujian budidaya dan pakan ternak
 - Memanfaatkan sumberdaya ternak lokal dengan pengembangan inovasi teknologi.



- b. Memfasilitasi usaha budidaya peternakan melalui peningkatan akses di bidang permodalan untuk peningkatan skala usaha
- c. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak yang berbasis sumberdaya lokal dengan memanfaatkan inovasi teknologi.
- d. Memfasilitasi pengembangan usaha tani terpadu dan pengembangan komoditi unggulan yang berbasis agribisnis.
- e. Memfasilitasi pengembangan sistem informasi budidaya peternakan

(2) Jangka Panjang

- a. Pengembangan sistem dan pola budidaya peternakan untuk menciptakan bentuk usaha tani ternak yang efisien, moderen dan berkesinambungan serta ramah lingkungan.
- b. Pemberdayaan peternak untuk meningkatkan kelembagaan menuju kemandirian dan berwawasan agribisnis.

D. Kesehatan Hewan

(1) Jangka Pendek dan Menengah

- a. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk timbulnya wabah penyakit hewan
- b. Peraturan tentang pengendalian penyakit hewan (menular / tidak menular)



- c. Mengembangkan jaringan laboratorium diagnostik dan penyidikan penyakit hewan
- d. Pemetaan penyakit hewan nasional
- e. Sistem informasi kesehatan nasional
- f. Fasilitasi dan koordinasi pembebasan penyakit brucellosis dan rabies
- g. Prosedur baku importasi hewan
- h. Prosedur baku kesiagaan darurat veteriner
- i. Pembentukan peraturan obat hewan
- j. Desentralisasi produksi obat hewan
- k. Pengembangan promosi ekspor obat hewan
- l. Pedoman privatisasi pelayanan kesehatan hewan
- m. Mempertahankan tetap bebas Penyakit Mulut dan Kuku

(2) Jangka Panjang

- a. Privatisasi pelayanan kesehatan hewan.
- b. Pembebasan penyakit hewan strategis.
- c. Jaringan kerjasama laboratorium dengan luar negeri.

(3) Khusus (Jangka Pendek - Jangka Panjang)

Mempertahankan bebas penyakit hewan menular eksotik

E. Pengembangan Peternakan.

(1) Jangka Pendek dan Menengah.

- a. Inventarisasi dan penyesuaian data ternak pemerintah.
- b. Identifikasi potensi bangsa - bangsa ternak.
- c. Penyusunan sistem informasi pengembangan peternakan.



- d. Penyusunan sistem dan pola pengembangan ternak.
- e. Penyusunan standar teknis pengembangan kawasan peternakan.
- f. Penyusunan model kelembagaan peternak.
- g. Kerjasama regional dan lintas sektor.
- h. Analisis potensi peternak.
- i. Penggalian sumber-sumber pembiayaan.
- j. Pembinaan kawasan peternakan

(2) Jangka Panjang

- a. Terlaksananya penyerahan aset ternak pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
- b. Tersedianya sistem informasi pengembangan peternakan.
- c. Tersedianya sistem dan pola pengembangan ternak.
- d. Berkembangnya kelembagaan peternakan.
- e. Berkembangnya kawasan-kawasan peternakan.

F. Kesehatan Masyarakat Veteriner

(1) Jangka Pendek dan Menengah

- a. Penetapan peraturan, norma, standar tentang pencegahan dan pengawasan zoonosis.
- b. Penetapan peraturan, norma, standar tentang RPH/RPU
- c. Melaksanakan gerakan peduli ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
- d. Sistem mutu laboratorium KESMAVET.
- e. Akses terhadap pelayanan SPS dan standar nasional.



(2) Jangka Panjang

- a. Upaya-upaya penerapan sistem jaringan mutu dan keamanan produk pangan hewani.
- b. Upaya-upaya memasuki dan memperoleh pengakuan dari *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*.

G. Pusat Pengembangan Inseminasi Buatan dan Embrio Ternak (PUSPITNAK).

(1) Jangka Pendek dan Menengah.

- n. Menyediakan semen secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat *breed* sesuai dengan kebutuhan, serta mudah untuk diperoleh yang diselenggarakan oleh BIB Lembang, BIB Singosari dan daerah (desentralisasi).
- o. Menyediakan embrio berkualitas tinggi sesuai dengan *breed yang* diinginkan.
- p. Membentuk unit-unit rearing (pembesaran) ternak bibit unggul lokal bersertifikat melalui *progeny test* dan *performance test*.

(2) Jangka Panjang.

Memberi peluang swasta untuk menyediakan semen berkualitas, sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator.



BAB VII

KETERPADUAN DAN PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS KOMODITAS PETERNAKAN

7.1. Dasar Keterpaduan

Dalam rangka membangun sistem agribisnis sebagaimana telah diuraikan adalah merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari sub sistem agribisnis hulu, yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi dan teknologi. Sub sistem usahatani, yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan. Sub sistem agribisnis pengolahan, sub sistem pemasaran dan sub sistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan agribisnis. Selanjutnya khusus didalam sub sistem usaha tani berbasis ternak dapat dijabarkan dalam kegiatan operasional yang mencakup layanan yang diperlukan, pengembangan kelembagaan, dukungan saran dan prasarana serta peraturan pendukungnya.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maka pemerintah harus membatasi peranannya pada aspek *facilitating*, *regulating* dan *accelerating*. Pemerintah pada dasarnya akan bergerak dalam ranah publik, yaitu hal-hal yang bersifat *public goods*, *externalities*, *moral hazard* dan *economic of scale*.

Selain itu harus terjadi perubahan pola pemikiran dari pertanian sebagai usaha tani budidaya (*off farm*) menjadi kegiatan agribisnis *on farm* dan *off farm*, sedangkan program harus didasarkan atas (1) perubahan kelembagaan dan pola pikir serta sikap semua manusia pelaku yang terlibat secara mendasar; (2) program dan kegiatan difokuskan pada pemberdayaan manusia dan bukannya penyediaan peralatan fisik. Tanpa bantuan pemerintah, petani telah berhasil



mengembangkan berbagai teknologi budidaya (tandur jajar, minimum tillage, gogo rancah, singkong karet, sistem surya, dsb), alat mekanis pertanian (luku, landak, alat pengering dsb), kelembagaan (lumbung, mitra cai, subak dsb) dan banyak lagi; (3) penyediaan sarana fisik oleh pemerintah difokuskan dalam bentuk prasarana publik yang mendukung sektor pertanian serta lingkungan bisnis yang kondusif.

Berdasarkan pemikiran ini maka pembangunan peternakan harus meletakkan kegiatannya pada perumusan makro yang menciptakan insentif bagi pembangunan usaha agribisnis, penyediaan sarana dan prasarana, dan pengembangan kelembagaan pelayanan dan kelembagaan pelaku agribisnis dalam upaya memberdayakan mereka untuk mengembangkan usaha.

7.2. Isu-isu Kritis Pengembangan Sistem Agribisnis Berbasis Peternakan

7.2.1. Ternak Potong.

Karena tingkat produksi yang belum dapat mengimbangi permintaan, maka terjadi pengurusan ternak potong dalam negeri yang mengakibatkan populasi menurun dan mengancam kelestarian populasi ternak yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut beberapa upaya yang dapat dilaksanakan adalah :

- Penyediaan bibit unggul
- Pengendalian pemotongan betina produktif
- Pengendalian penyakit hewan menular
- Pemanfaatan teknologi reproduksi



usahatani tanaman pangan dan hortikultura, usahatani tanaman obat-obatan, usahatani peternakan dan usahatani perkebunan.

3. **Sub Sistem Agribisnis Pengolahan (*down stream agribusiness*)**, yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan, baik produk antara (*intermediate product*) maupun produk akhir (*finish product*). Termasuk didalamnya industri makanan, industri minuman, industri barang-barang serat alam (barang-barang karet, plywood, pulp, kertas, bahan-bahan bangunan terbuat dari kayu, rayon, benang dari kapas/sutera, barang-barang kulit, tali dan karung goni). Industri biofarmaka dan industri agrowisata.
4. **Sub Sistem Agribisnis Pemasaran**, yakni kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian, baik segar maupun olahan di dalam dan di luar negeri. Termasuk didalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar (*market intellegence*).
5. **Sub Sistem Jasa**, yang menyediakan jasa bagi sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usahatani dan sub sistem agribisnis hilir. Termasuk kedalam sub sistem ini adalah penelitian dan pengembangan, perkreditan dan asuransi, transportasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, sistem informasi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah (mikroekonomi, tata ruang, makroekonomi).
6. **Indikator** adalah suatu besaran yang bersifat kualitatif dan atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kerja



harus merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai berfungsi.

7. Kegiatan Operasional adalah penjabaran lebih lanjut dari kegiatan utama yang telah ditetapkan. Sehingga kegiatan operasional adalah tahap gabungan dari berbagai komponen aktivitas untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kegiatan operasionalnya mencakup jenis-jenis kegiatan (rincian), layanan yang diperlukan dan pengembangan aspek kelembagaan yang sesuai dengan kegiatan utamanya. Selain itu kegiatan operasional didukung oleh sarana prasarana. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan :

- a. Kegiatan** adalah rincian aktivitas yang merupakan komponen dari kegiatan utama.
- b. Layanan** adalah usaha untuk melayani kebutuhan agar kegiatan berjalan lancar, sehingga layanan akan memberikan kemudahan untuk tercapainya tujuan kegiatan. Bentuk-bentuk pelayanan dapat berupa layanan tataniaga, penyediaan teknologi, penyuluhan, pelayanan teknis, fasilitas dan insentif, kebijakan yang kondusif, layanan pengujian dan sebagainya
- c. Pengembangan Kelembagaan** adalah bentuk-bentuk kelembagaan yang sesuai dan dapat dikembangkan agar mempermudah tercapainya indikator. Kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu pola atau sistem yang terstruktur yang menyangkut interaksi pelaku. Jadi, kelembagaan tidak identik dengan organisasi.



BAB VIII PENUTUP

Pembangunan peternakan dengan pendekatan agribisnis yang berkerakyatan diarahkan menjadi kelompok berdasarkan komoditas keunggulan daerah yang selanjutnya menjadi sentra produksi dengan konsep kerjasama kemitraan yang *win win solution*. Sehingga peran pemerintah diharapkan untuk memberdayakan dan memfasilitasi tumbuh kembangnya kreativitas masyarakat luas di seluruh daerah. Dengan demikian secara alamiah pembangunan peternakan dengan sistem dan usaha agribisnis pada hakekatnya merupakan pembangunan daerah. Ini dengan jelas sangat sesuai dengan esensi otonomi daerah.

Kelembagaan yang sangat perlu untuk mendukung pembangunan peternakan sebagai penentu kebijakan dan penataan pelaksanaannya yang berdaya guna dan berhasil guna antara lain kelembagaan pemerintah yang berfungsi sebagai pembina, pengawas, peneliti, dan pelaksana pendidikan pelatihan serta penyuluhan yang perlu tersedia pada tingkat propinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Kelembagaan atau kelompok peternak merupakan wadah belajar mengajar, unit produksi, wahana kerjasama antar anggota dan antar kelompok dengan pengusaha yang bergerak di bidang peternakan. Kelompok peternak ini dikembangkan menjadi koperasi atau unit usaha agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi sarana produksi pengolahan hasil, pemasaran, dan upaya mendapat modal untuk meningkatkan skala usahanya. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut perlu ditangani secara serius oleh SDM profesional dalam satu lembaga pemerintah.



Di masa depan, khususnya dalam era perdagangan bebas, bidang-bidang yang harus ditangani oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan akan semakin banyak dan kompleks. Masalah yang timbul bukan saja aspek yang berhubungan dengan peningkatan produksi tetapi akan lebih luas meliputi masalah-masalah ekspor dan impor produk-produk peternakan dan hasil ikutannya yang berpotensi sebagai bahan *bioterrorism*, *biomolekuler* dan *substansi transgenik* yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Perkembangan yang begitu cepat di bidang teknologi dan perdagangan global telah menempatkan posisi otoritas veteriner di pemerintahan sebagai kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat (*public health*). Otoritas veteriner dalam administrasi publik bukan hanya harus mampu menjawab persoalan yang dikemukakan oleh otoritas yang menangani pertanian, akan tetapi juga oleh otoritas yang menangani kesehatan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan otoritas veteriner harus mampu menjamin bahwa seluruh persoalan yang berhubungan dengan kegiatan dan kompetensi bidang veteriner dikelola secara efektif dan sedemikian rupa sehingga mengedepankan hak dan standar perlindungan kesehatan bagi semua warga negara. Tanpa tindakan pengendalian resmi yang efektif oleh otoritas veteriner, tidak ada satu negarapun yang mampu memiliki akses ke pasar internasional ternak, produk ternak dan bahan pangan asal ternak.

Demikian beberapa pokok pemikiran mengenai basis pembangunan peternakan masa depan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (*knowledge based industry*) melalui pembangunan daerah perbatasan dan percepatan pembangunan peternakan serta pembangunan daerah konflik dan bencana. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembangunan pertanian, khususnya bidang peternakan.

